

ABSTRAK

Pembangunan pagar Alun-alun Utara dilakukan pada akhir tahun 2020 oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu mengundang kontroversi bagi sebagian masyarakat. Penolakan melalui media sosial Twitter dilakukan dengan tanda pagar #BebaskanAlunAlun. Protes masyarakat terbagi menjadi 3 hal yaitu: 1) Keraton Yogyakarta semakin memiliki jarak dengan rakyat, 2) Dana Keistimewaan seharusnya digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19, dan 3) Alun-alun Utara tidak bisa diakses dengan bebas seperti dulu. Pemerintah tidak pernah menanggapi protes tersebut secara langsung. Jawaban dari pemerintah didapatkan melalui wawancara dalam berita, seperti yang terdapat pada berita di Detik.com, Kompas.com, dan Liputan6.com. Penelitian berjenis kualitatif dengan teori Walter Fisher ini dilakukan untuk menganalisis narasi yang disampaikan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di tiga berita media dalam jaringan paling banyak dibaca di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi tidak terstruktur, dokumen, dan analisis narasi itu sendiri. Tujuannya adalah mengetahui kebenaran narasi dan kepada siapa saja narasi ditujukan. Sumber data utama pada penelitian ini adalah berita media dalam jaringan yakni Detik.com, Kompas.com, dan Liputan6.com. Hasil akhirnya adalah pemahaman bahwa setiap narasi bisa diuji lagi kebenarannya (*coherence*) dan disimpulkan apakah narasi itu mengandung logika alasan yang baik (*fidelity*). Setiap narasi memiliki kesalahan pemaknaan dan ketidaksesuaian fakta di aspek tertentu. Meski demikian, semua narasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Alun-alun, Daerah Istimewa Yogyakarta, narasi, Walter Fisher

ABSTRACT

The construction of the North Square fence was carried out at the end of 2020 by the government of the Special Region of Yogyakarta. It invites controversy for some people. The rejection through Twitter social media was carried out with the hashtag #BebaskanAlunAlun. Public protests are divided into three things, namely: 1) The Yogyakarta Palace is getting closer to the people, 2) the Privilege Fund should be used for handling the COVID-19 pandemic, and 3) The North Square cannot be accessed freely as it used to be. The government never responded to the protests directly. Answers from the government are obtained through interviews in the news, such as in the news in the top three most read media in Indonesia. This qualitative research using Walter Fisher's theory was conducted to analyze the narratives conveyed by the government of the Special Region of Yogyakarta in the three news media in the most widely read network in Indonesia. The data collection techniques used were unstructured observations, documents, and analysis of the narrative itself. The goal is to find out the truth of the narrative and to whom the narrative is addressed. The main data sources in this research are news media in the network, namely Detik.com, Kompas.com, and Liputan6.com. The end result is an understanding that each narrative can be tested again for its truth (coherence) and concluded whether the narrative contains a good logic of reason (fidelity). Each narrative has a misinterpretation and a mismatch of facts in certain aspects. However, all the narratives conveyed by the Yogyakarta Special Region Government are basically aimed at the community, especially the people of the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: *Alun-alun, Yogyakarta Special Region, narrative, Walter Fisher*